

## DAFTAR PUSTAKA

- Berlian, Ong dan Bangun Lubis. 2012. Ilmu Administrasi Dasar - dasar dan Teori. Palembang: Pustaka Felicha.
- Ghozali, Imam. 2007. *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Dipenogoro.
- Halim, Abdul. 2013. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul. 2016. *Manajemen Keuangan Sektor Publik Problematika Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah*. Jakarta: Salemba Empat
- Halim, Abdul dan Muhammad Iqbal. 2012. *Pegelolaan keuangan daerah edisi ketiga*. Jakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN
- Herryanto, Hendris. 2012. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keterlambatan Penyerapan Anggaran Belanja pada Satuan Kerja Kementerian/Lembaga di Wilayah Jakarta*. Tesis (Dipublikasikan). Jakarta: Fakultas Ekonomi. Universitas Indonesia.
- Nugroho, Adi Mashudi. 2013. *Analisis Faktor-Faktor Yang Menyebabkan penumpukan Pencairan Dana APBN Di Akhir Tahun (Studi Kasus Di KPPN Malang*. Jurnal. Malang: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis. Universitas Brawijaya
- Putri, Carlin Tyas. 2014. *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran pada satuan kerja perangkat daerah di pemerintah provinsi Bengkulu*. Skripsi. Bengkulu: Jurusan akuntansi Fakultas ekonomi dan bisnis. Universitas Bengkulu.
- Priatno, Adi Prasetyo. 2013. *Analisis Faktor-FaktorYang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pada Satuan Kerja Lingkup Pembayaran Kppn Blitar*. Jurnal. Malang: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis. Universitas Brawijaya.
- Rahayu, Sri Lestari. 2011. Outlook Penyerapan Belanja Kementerian/Lembaga 2011. *Policy Paper Pusat Kebijakan APBN*.
- Sedarmayanti. 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia Reformasi Birokrasi dan Manejemn Pegawai Negeri Sipil*. Bandung: Refika Aditama.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R D*. Jakarta: Alfabeta
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi*. Bandung: Alfabeta

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2008. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2008 tentang tata cara penyusunan dan penyajian laporan keuangan belanja subsidi dan belanja lain-lain pada bagian anggaran pembiayaan dan perhitungan. Kementerian Hukum dan HAM: Jakarta.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2010. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.05/2010 tentang Penyelesaian Tagihan atas Beban APBN pada Satuan Kerja. Kementerian Hukum dan HAM: Jakarta.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2011. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 164/PMK.05/2011 Tentang Petunjuk Penyusunan Dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran. Kementerian Hukum dan HAM: Jakarta.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2012. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara. Kementerian Hukum dan HAM: Jakarta.

Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Sekretariat Negara: Jakarta.

Republik Indonesia. 2003. Undang – Undang No. 17 tentang Keuangan Negara. Sekretariat Negara: Jakarta.

Republik Indonesia. 2004. Undang – Undang No. 1 tentang Perbendaharaan Negara. Sekretariat Negara: Jakarta.

Republik Indonesia. 2004. Undang – Undang No. 15 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Sekretariat Negara: Jakarta.

Republik Indonesia. 2004. Undang – Undang No. 25 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sekretariat Negara: Jakarta.

[www.Beritasatu.com](http://www.Beritasatu.com) diakses pada tanggal 17 Februari 2017

<http://e-monev.bappenas.go.id/> diakses pada tanggal 17 Februari 2017

<http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-studi-pustaka/> diakses pada tanggal 13 Maret 2017